



**FORMAT POLITIK ORDE BARU DAN KEBIJAKAN FUSI PARTAI
POLITIK TAHUN 1973**

SKRIPSI

Oleh:

**M. Iqbal Ibrahim Hamdani
NIM 060210302244**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2012**



**FORMAT POLITIK ORDE BARU DAN KEBIJAKAN FUSI PARTAI
POLITIK TAHUN 1973**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Pendidikan Sejarah (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh:

M. Iqbal Ibrahim Hamdani
NIM 060210302244

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2012**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda Yayak Wijiati tercinta, yang penuh kesabaran, doa dan airmatanya telah memberikan kasih sayang kepada saya;
2. Ayahanda Drs. Muraði, yang telah memberikan pengorbanan dan membimbing saya menuju jalan yang lurus;
3. Guru-guruku dan Dosen terhormat, yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan bimbingan dengan penuh kesabaran;
4. Almamater yang kubanggakan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

MOTO

Cita-cita dibangun dari sebuah mimpi. Jangan takut untuk bermimpi besar, sebab orang yang tidak punya mimpi berarti tak punya cita-cita dan masa depan^{*)}

^{*)} Prasetyo, Wiwid. 2009. *Orang Miskin Dilarang Sekolah (Mimpi-mimpi tak terjamah)*. Jogjakarta: DIVA Press.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Iqbal Ibrahim Hamdani

NIM : 060210302244

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "Format Politik Orde Baru dan Kebijakan Fusi Partai Politik Tahun 1973" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Februari 2012

Yang menyatakan,

M. Iqbal Ibrahim Hamdani

NIM 060210302244

SKRIPSI

**FORMAT POLITIK ORDE BARU DAN KEBIJAKAN FUSI PARTAI
POLITIK TAHUN 1973**

Oleh

M. Iqbal Ibrahim Hamdani
NIM 060210302244

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Drs. Budiyono, M.Si

Dosen Pembimbing II : Drs. Sumarjono, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Format Politik Orde Baru dan Kebijakan Fusi Partai Politik Tahun 1973" telah diuji dan disahkan pada :

hari, tanggal : Kamis, 16 Februari 2012

tempat : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Kayan Swastika, M.Si.
NIP 19670210 200212 1 002

Drs. Sumarjono, M.Si
NIP 19580823 198702 1 001

Anggota I

Anggota II

Drs. Marjono, M.Hum
NIP 19600422 198802 1 001

Drs. Budiyo, M.Si
NIP 19570702 198601 1 001

Mengesahkan

Dekan,

Drs. H. Imam Muchtar, S.H., M.Hum.
NIP 19540712 198003 1 005

RINGKASAN

Format Politik Orde Baru dan Kebijakan Fusi Partai Politik Tahun 1973; M. Iqbal Ibrahim Hamdani, 060210302244; 2006: 108 halaman; Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Dikeluarkannya Maklumat Pemerintah yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta tertanggal 3 November 1945, memuat keinginan pemerintah akan kehadiran partai politik. Pemerintah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk mendirikan partai politik dalam rangka memperkuat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan menyalurkan aspirasi rakyat secara teratur. Pada pemilihan umum tahun 1955, jumlah partai politik di Indonesia mencapai 29 partai dan ditambah dari perorangan atau independen. Namun dalam perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa konflik ideologi yang dibawa masing-masing partai politik merupakan salah satu faktor penyebab Konstituante gagal merumuskan Undang-Undang baru. Berdasarkan hal tersebut, pada masa Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno melakukan penyederhanaan sistem kepartaian dengan Penpres No. 7 tahun 1959 dan Perpres No. 13 tahun 1960 yang mengatur tentang pengakuan, pengawasan, dan pembubaran partai politik. Tanggal 14 April 1961 diumumkan hanya 10 partai politik yang mendapat pengakuan dari pemerintah. Keadaan berlanjut sampai Presiden Soekarno meletakkan jabatannya yang kemudian digantikan oleh Soeharto dan dikenal dengan masa Orde Baru.

Orde Baru lahir sebagai koreksi total dari pemerintahan sebelumnya dimana keadaan politik yang tidak stabil menyebabkan kehancuran dalam bidang ekonomi. Selanjutnya pemerintah Orde Baru menciptakan sebuah format politik dengan tujuan untuk menciptakan stabilitas nasional, baik dalam bidang politik, sosial, dan

ekonomi. Berdasarkan hal inilah penulis ingin mengkaji permasalahan (1) format politik Orde Baru, (2) pengendalian kehidupan politik nasional, (3) dampak Fusi terhadap dinamika partai politik setelah pemilu 1977. Tujuannya adalah (1) mendeskripsikan format politik Orde Baru, (2) menganalisis pengendalian kehidupan politik nasional, (3) menganalisis dampak Fusi terhadap kehidupan partai politik setelah pemilu 1977.

Penelitian ini menggunakan pendekatan pembuatan kebijakan yang diambil dari Harold D. Lasswell dan Richard C. Snyder. Sedangkan teorinya adalah teori elit yang di ambil dari pendapat Pareto dan Roberto Michels. Penulis menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa format politik Orde Baru dibuat untuk menciptakan stabilitas nasional. Namun pada kenyataannya semata-mata untuk mempertahankan kekuasaan. Posisi dominan ABRI dan DPR tidak lebih sebagai alat perpanjangan tangan penguasa dan alat legitimasi kebijakan. Sementara itu pengendalian kehidupan politik yang salah satunya melalui Fusi justru menimbulkan dampak baru yaitu konflik dalam tubuh partai politik baik secara intern maupun ekstern. Ditambah lagi dengan dikeluarkannya UU. RI. No. 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya dimana partai politik tidak dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya.

Kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Orde Baru membentuk format politik yang pada awalnya sebagai koreksi total terhadap pemerintahan sebelumnya. Namun dalam perkembangannya justru format politik tersebut merupakan langkah awal pemerintahan Suharto untuk mempertahankan kekuasaan. Salah satunya melalui fusi terhadap partai politik yang menimbulkan konflik baru diantara unsur yang ada dalam partai. Berdasarkan hal tersebut maka diharapkan bahwa proses demokrasi harus berjalan sesuai dengan aturan dimana pemerintah dituntut untuk bersikap netral tanpa memihak kepentingan salah satu golongan. Sedangkan untuk partai politik diharapkan dapat menjalankan fungsi dan menghindari terjadinya konflik.

PRAKATA

Dengan menyebut asma Allah SWT dan memanjatkan puji syukur atas segala rahmat, hidayah dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Format Politik Orde Baru dan Kebijakan Fusi Partai Politik Tahun 1973". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Jember.
2. Drs. H. Imam Muchtar, SH, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.
3. Drs. Budiyo M.Si selaku Dosen Pembimbing I, Drs. Sumarjono M.Si selaku Dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta perhatiannya guna memberikan bimbingan demi terselesainya skripsi ini.
4. Drs. Sumarjono M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Pendidikan Sejarah Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial yang secara tulus memberikan ilmu kepada penulis selama ini, mohon maaf atas segala tindakan dan perkataan yang tidak berkenan di hati.
6. Keluargaku yang selalu memberikan doa dan semangat.
7. Sahabat dan teman-teman angkatan 2006 yang tidak akan terlupa, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat.

Jember, 22 Februari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Penegasan Pengertian judul	8
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	9
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penelitian	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN	20
BAB 4. FORMAT POLITIK ORDE BARU	25
4.1 Peran Sosial Politik ABRI Diperluas	27
4.2 Lembaga Kepresidenan yang Kuat	32
4.3 Birokrasi Sipil yang Terkendali í í í í í í í í í ...	34
4.4 Peran Partai Politik Diperlemah	39

BAB 5. PENGENDALIAN KEHIDUPAN POLITIK NASIONAL	
PADA MASA ORDE BARU.....	43
5.1 Reorganisasi Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar.....	43
5.2 Kehidupan Organisasi Sosial Kemasyarakatan.....	47
5.3 Penyederhanaan Partai Politik.....	51
5.3.1 Partai yang Berbasis Kebangsaan.....	58
5.3.2 Partai yang Berbasis Keagamaan.....	62
BAB 6. DAMPAK FUSI TERHADAP KEHIDUPAN PARTAI	
POLITIK SETELAH PEMILU 1977.....	66
6.1 Dampak Fusi dan Pemilihan Umum 1977.....	67
6.2 Dinamika Politik PPP Setelah Pemilu 1977.....	74
6.3 Dinamika Politik PDI Setelah Pemilu 1977.....	86
BAB 7. PENUTUP.....	99
7.1 Kesimpulan.....	99
7.2 Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN.....	105

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Perolehan suara Pemilu 1971	54
Tabel 2. Perolehan Suara Pemilu 1977	72
Tabel 3 Perolehan Suara Pemilu 1982	77
Tabel 4 Perolehan Suara Pemilu 1987	80
Tabel 5 Perolehan Suara Pemilu 1992	83
Tabel 6 Perolehan Suara Pemilu 1997	85
Tabel.7 Struktur DPP PDI hasil Kongres II	87
Tabel 8 Susunan DPP PDI 1986-1991	91

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Matriks Penelitian	105
B. Foto	106